

KLASIFIKASI KECAMATAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

S.B. Silalahi

¹⁾Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

²⁾Dosen Program Pasca Sarjana Geografi, FMIPA UI

Abstrak

Klasifikasi kecamatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan hasil penelitian, bertujuan mengklasifikasikan kecamatan berdasarkan potensi pembangunan yang telah dimiliki oleh kecamatan tersebut, baik fisik, sosial dan ekonomi.

Data yang dipergunakan adalah data Potensi Desa tahun 1996 dan data Susenas 1997 dari Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung oleh pengecekan lapangan pada beberapa kecamatan dan kabupaten/kotamadya.

Pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan menggunakan fasilitas paket program SPSS versi 7.5 khususnya program faktor analisis dengan menggunakan 54 variabel yang dibangkitkan dari variabel desa yang ada, dimana akhirnya diperoleh sebanyak 13 kelompok variabel/faktor yang mampu menjelaskan sebesar 76,74% keragaman yang terkandung dalam data.

Kemudian untuk mendapatkan klasifikasi kecamatan yang berjumlah 75, dengan menghitung score tiga belas faktor untuk setiap kecamatan, kemudian akan dapat dilihat kecamatan-kecamatan yang mendapat prioritas pembangunan yang sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi. Apabila prosedur ini ditempuh, maka secara bertahap kesenjangan pembangunan secara spasial antar wilayah kecamatan dapat diperkecil secara bertahap.

Penelitian ini akan lebih baik lagi hasilnya apabila data aspek-aspek pertanahan diikutsertakan dalam variabel yang dianalisa. Hanya sayang pada saat ini belum tersedia secara baik di desa maupun di kecamatan.

Abstract

Sub district classification of Daerah Istimewa Yogyakarta province is the result of research based on sub district physical, social, and economic potential.

The data that is used for classification is village potential data 1996 and National Census data 1997 from Statistical Bureau Daerah Istimewa Yogyakarta province, and strengthened by field survey. The data is processed and analyzed by SPSS programme version 7.5, especially analysis factor programme using 54 variables that taken from the existing village variables. The result of data analysis, it is found 13 group of variables / factor that explain 76,74% data diversity.

The scoring calculation of 13 factors for every sub district, it is found 75 sub district classification, that lead to development priority for sub district, sustain with sub districts potential and problem. When this procedure is done, that leads to the gradually decreasing of development kesenjangan between sub district areas.

This research can get the best, when land aspect data is included into analyzed variable. Unfortunately, at the present this data is not well available in the village or sub district.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah banyak mendatangkan kemajuan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi kita tidak boleh menulup mata, bahwa di sam-

ping keberhasilan yang telah dicapai, banyak juga kekurangan maupun kegagalan yang harus segera kita perbaiki, terutama pembangunan untuk rakyat di pedesaan.

Untuk setiap langkah yang diambil dalam melaksanakan pembangunan, kita membutuhkan fakta yang dapat digunakan sebagai titik tolak untuk mencapai tujuan dengan berpedoman kepada semua peraturan yang ada. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar untuk kepentingan rakyat, lebih-lebih bagi pembangunan yang membutuhkan tanah/ruang ("spatial"). Dimana semua itu harus bertolak dari keadaan sekarang dan melihat kemungkinan yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan. Usaha pembangunan yang seperti ini adalah pekerjaan yang besar dan bersifat lintas sektoral, sehingga penanganannya harus "beraturan" atau "sistematis", dan pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu.

Dengan makin kuatnya pertumbuhan demokrasi dan pembangunan untuk rakyat, maka makin kuat pulalah tumbuhnya usaha untuk melaksanakan pengkajian secara seksama agar pembangunan demi "kepentingan rakyat banyak", sejalan dengan aspirasi rakyat dan potensi daerah, baik itu untuk kepentingan lokal, regional, maupun nasional. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah : Bagaimana caranya menyelenggarakan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi rakyat berdasarkan fakta daerah sejalan dengan sistem pembangunan, sistem administrasi pemerintahan, sistem perundangan yang berlaku, sistem pendanaan, serta melibatkan seluruh masyarakat setempat untuk kemakmuran rakyat dengan tetap melaksanakan kelestarian lingkungan serta mengurangi kesenjangan spasial ?

Penelitian ini sangat berguna dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

II. METODOLOGI

2.1. Daerah Penelitian

Klasifikasi kecamatan dilakukan di propinsi DIY yang mencakup daerah perkotaan dan pedesaan. Seluruh kecamatan di DIY dianalisis agar

setiap kecamatan dapat dikelompokkan menurut potensinya.

2.2. Pengolahan Data

Data inti yang digunakan untuk membuat klasifikasi adalah data PODES 1996 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi DIY. Dari data mentah, disusun variabel-variabel yang lebih bermakna untuk mencerminkan tingkat potensi dan masalah kecamatan yang dihadapi.

Data/variabel kecamatan diperoleh dengan melakukan agregasi data/variabel desa. Di samping agregasi, dilakukan juga perhitungan prosentasi dan desa-desa yang memiliki karakteristik tertentu terhadap seluruh desa di kecamatan.

2.3. Analisis Data

Untuk memperoleh kriteria kelompok kecamatan yang bersifat "independent" satu dengan yang lain maka digunakan metode Faktor Analisis. Pada prinsipnya, metode ini membuat variabel baru yang disebut faktor dari variabel-variabel awal. Dengan menggunakan metode rotasi VARIMAX, maka diperoleh faktor yang relatif bersifat bebas. Perhitungan dalam membuat rumusan faktor dan skor masing-masing faktor digunakan paket program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 7.5.

Berdasarkan skor faktor yang diperoleh dibuat kelompok kecamatan. Untuk masing-masing faktor, seluruh kecamatan dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu rendah, sedang, dan tinggi dengan rumusan sebagai berikut :

Rendah jika skor Faktor $\leq -1,0$

Sedang jika skor Faktor $> -1,0$ sampai $\leq 1,0$

Tinggi jika skor Faktor > 1

Dengan menggunakan kriteria "cutting point" seperti diuraikan tersebut, maka kecamatan-kecamatan di DIY dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai sudut pandang (faktor) sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi kecamatan.

III. HASIL PENELITIAN

3.1. Variabel Awal

Seperti telah diuraikan sebelumnya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibuat dari

variabel mentah data potensi desa. Karena unit analisis dalam penelitian ini adalah kecamatan, maka variabel yang digunakan merupakan agregasi dari variabel peringkat desa. Sebanyak 54 variabel tingkat kecamatan berhasil dibuat dari variabel tingkat desa. Kelima puluh empat varia-

bel inilah analisis klasifikasi kecamatan dilakukan.

Ke-54 variabel yang berhasil dibuat tersebut, dikelompokkan ke dalam kelompok variabel fisik, sosial dan ekonomi. Secara terperinci, ke-54 variabel tersebut disajikan pada tabel 1.

Tabel 1.
Daftar Variabel Yang Digunakan Dalam Analisis

No.	Kelompok	No.	Keterangan
1	Fisik	1.	Rasio luas sawah terhadap luas kecamatan
		2.	Rasio luas sawah teknis terhadap luas sawah
		3.	Rasio luas sawah tadah hujan terhadap luas sawah
		4.	Rasio luas tegalan terhadap luas tanah kering
		5.	Rasio luas kebun terhadap luas tanah kering
		6.	Rasio hutan rakyat terhadap luas tanah kering
		7.	Rasio luas perkampungan terhadap luas tanah non pertanian
		8.	% jumlah desa pantai
		9.	% jumlah desa bukit
		10.	% jumlah desa dataran tinggi
		11.	% jumlah desa dataran rendah
		12.	% jumlah desa potensi utama pertanian
		13.	% jumlah desa potensi utama perkebunan
		14.	% rata-rata jarak desa ke TK terdekat
		15.	Rata-rata jarak desa ke SD terdekat
		16.	Rata-rata jarak desa ke SMP terdekat
		17.	Rata-rata jarak desa ke SMU terdekat
		18.	Rata-rata jarak desa ke PT terdekat
2	Sosial	1.	Rasio jumlah RT memiliki telepon terhadap jumlah RT
		2.	Rasio jumlah RT memiliki TV terhadap jumlah RT
		3.	Rasio jumlah RT memiliki Radio terhadap jumlah RT
		4.	Rasio jumlah RT berlangganan listrik terhadap jumlah RT
		5.	Rasio jumlah RT memiliki mobil terhadap jumlah RT
		6.	Rasio jumlah RT pra-sejahtera terhadap jumlah RT
		7.	Rasio jumlah RT dikepalai wanita terhadap jumlah RT
		8.	Rasio jumlah RT menyekolahkan anak ke PT terhadap jumlah RT
		9.	Jumlah wartel dalam 1000 penduduk
		10.	% jumlah desa bersifat pedesaan
		11.	Jumlah Pos Kepolisian dalam 1000 penduduk
		12.	% jumlah desa sumber mata pencaharian mayoritas RT pertanian
		13.	% jumlah desa sumber mata pencaharian mayoritas RT non-pertanian
		14.	% jumlah desa menggunakan bahan bakar kayu bakar
		15.	% jumlah desa menggunakan bahan bakar minyak
		16.	% jumlah desa mayoritas menggunakan jamban
		17.	Rasio jumlah sederhana terhadap jumlah rumah
		18.	Jumlah TK dalam 1000 penduduk
		19.	Jumlah SD dalam 1000 penduduk
		20.	Jumlah SMP dalam 1000 penduduk
		21.	Jumlah SMU dalam 1000 penduduk

		22.	Jumlah PT dalam 1000 penduduk
		23.	Jumlah fasilitas kesehatan dalam dalam 1000 penduduk
		24.	Jumlah dokter dalam 1000 penduduk
		25.	Jumlah paramedis dalam 1000 penduduk
		26.	Rata-rata frekuensi muntaber
		27.	Rata-rata frekuensi demam berdarah
3	Ekonomi	1.	Jumlah pasar dalam 1000 penduduk
		2.	Jumlah kios saprotan dalam 1000 penduduk
		3.	Jumlah industri kecil dalam 1000 penduduk
		4.	Jumlah perkampungan industri dalam 1000 penduduk
		5.	Jumlah warung dalam 1000 penduduk
		6.	Jumlah BRI dalam 1000 penduduk
		7.	Jumlah KUD dalam 1000 penduduk
		8.	Jumlah industri pengolahan dalam 1000 penduduk
		9.	Jumlah industri bangunan dalam 1000 penduduk

Dari tabel 1 nampak bahwa dari 54 variabel yang dianalisis terdiri dari 18 variabel yang tergolong dalam variabel fisik, 27 variabel tergolong sosial dan 9 variabel tergolong variabel ekonomi. Sayangnya sekali variabel yang menyangkut aspek aspek pertanian tidak tersedia.

3.2. "Sreening" Variabel

Dalam menggunakan faktor analisis sebagai alat analisis data, yang perlu mendapat perhatian adalah ragam dari setiap variabel. Jika ada salah satu dari variabel memiliki ragam, maka analisis tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan pemeriksaan ("screening") sebelum analisis dilakukan. Dari ke-54 variabel yang dianalisis semuanya memiliki ragam > 0. Selanjutnya, ke-54 variabel tersebut digunakan dalam analisis.

3.3. Dimensi Data

Ukuran dimensi data ditentukan oleh jumlah variabel atau kelompok variabel yang saling tidak berkoreksi ("independen"). Hasil analisis menunjukkan bahwa dari ke-54 variabel ternyata hanya mengandung 13 dimensi saja. Ke-13 variabel baru ini (faktor) mampu menjelaskan sebesar ± 77% keragaman data dalam ke-54 variabel awal.

3.4. Variabel Klasifikasi

Variabel yang baik digunakan sebagai variabel klasifikasi adalah variabel yang bebas, satu dengan yang lain. Oleh karena itu, variabel baru yang diperoleh dari hasil analisis memenuhi

syarat jika digunakan sebagai variabel klasifikasi.

Ke-13 variabel tersebut (faktor) adalah sebagai berikut :

1. Faktor yang pertama adalah faktor yang mengukur dikotomi desa-kota. Faktor ini dicirikan oleh pemakaian bahan bakar kayu, % desa yang memiliki potensi utama pertanian, % desa yang sumber mata pencaharian mayoritas rumah tangga pertanian, rasio luas tegalan, jumlah KUD (berkorelasi positif); mayoritas rumah tangga menggunakan bahan bakar minyak, desa yang sumber mata pencaharian mayoritas rumah tangga non-pertanian, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah dokter, % desa yang mayoritas rumah tangga menggunakan jamban, % rumah tangga yang berlangganan listrik dan % rumah tangga yang memiliki mobil (berkorelasi positif).
2. Faktor yang kedua adalah faktor yang mengukur tingkat keterbelakangan pembangunan. Faktor ini dicirikan oleh rasio rumah sederhana, rasio luas sawah tidak hujan, % rumah tangga pra-sejahtera, jarak ke SMU, jarak ke SMP, jarak ke TK (berkorelasi positif); rasio rumah tangga memiliki radio, rasio rumah tangga yang dikepalai wanita (berkorelasi negatif). Semakin tinggi skor faktor ini, semakin terbelakang tingkat pembangunan kecamatan.
3. Faktor yang ketiga adalah faktor yang mengukur topografi kecamatan. Faktor ini dicirikan oleh % desa dataran rendah (berkorelasi

- positif); % desa dataran tinggi; % desa dengan potensi utama perkebunan dan % desa bukit (berkorelasi negatif). Semakin tinggi skor faktor ini, semakin bersifat dataran rendah suatu kecamatan. Sebaliknya, semakin rendah skor faktor ini, semakin bersifat dataran tinggi suatu kecamatan.
4. Faktor yang keempat adalah faktor yang mengukur tingkat kemajuan kecamatan. Faktor ini dicirikan oleh jumlah BRI, jumlah wartel, dan rasio rumah tangga yang menyekolahkan anak ke Perguruan Tinggi (PT). Semakin tinggi skor faktor ini, semakin maju suatu kecamatan.
 5. Faktor yang kelima adalah faktor yang mengukur tingkat ketersediaan pos keamanan. Faktor ini dicirikan oleh jumlah pos kepolisian dan jarak ke SD terdekat. Semakin tinggi skor faktor ini, semakin banyak tinggi faktor skor ini, semakin banyak pos kepolisian tetapi jarak desa ke SD terdekat relatif jauh.
 6. Faktor yang keenam adalah faktor yang mengukur tingkat ketersediaan sekolah menengah. Faktor ini dicirikan oleh jumlah sekolah SMP dan SMU. Semakin tinggi skor faktor ini, semakin banyak fasilitas sekolah menengah yang dimiliki suatu kecamatan.
 7. Faktor yang ketujuh adalah faktor yang mengukur tingkat ketersediaan paramedis. Faktor ini dicirikan oleh jumlah paramedis, jumlah rumah tangga yang memiliki mobil dan rasio luas sawah beririgasi teknis. Semakin tinggi skor faktor ini, semakin tersedia tenaga paramedis di suatu kecamatan.
 8. Faktor yang kedelapan adalah faktor yang mengukur tingkat kesehatan lingkungan. Faktor ini dicirikan oleh frekuensi demam berdarah dan muntaber. Semakin tinggi skor faktor ini, semakin sering terjadi demam berdarah atau muntaber di suatu kecamatan.
 9. Faktor yang kesembilan adalah faktor yang mengukur tingkat industrialisasi. Faktor ini dicirikan oleh jumlah industri pengolahan. Semakin tinggi skor faktor ini, semakin banyak industri pengolahan yang ada di suatu kecamatan.
 10. Faktor yang kesepuluh adalah faktor yang mengukur tipe kecamatan pantai. Faktor ini dicirikan oleh % desa pantai (berkorelasi

positif) dan rasio luas perkampungan (berkorelasi negatif). Semakin tinggi skor faktor ini, semakin bersifat pantai suatu kecamatan.

11. Faktor yang kesebelas adalah faktor yang mengukur tingkat aktivitas ekonomi tradisional. Faktor ini dicirikan oleh jumlah warung dan perkebunan rakyat. Semakin tinggi skor faktor ini, semakin tinggi aktivitas ekonomi tradisional (warung).
12. Faktor yang kedua belas adalah faktor yang mengukur perkampungan industri. Faktor ini dicirikan oleh jumlah perkampungan industri yang ada dalam suatu kecamatan. Semakin tinggi skor faktor ini, semakin banyak perkampungan industri yang dimiliki suatu kecamatan.
13. Faktor yang ketiga belas adalah faktor yang mengukur kegiatan industri kecil. Faktor ini dicirikan oleh jumlah industri kecil (berkorelasi positif) dan rasio luas hutan rakyat (berkorelasi negatif). Semakin tinggi skor faktor ini, semakin tinggi aktivitas industri kecil.

3.5. Hasil Klasifikasi Kecamatan

Dengan menerapkan kriteria klasifikasi seperti telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kecamatan-kecamatan yang memiliki sifat sangat pedesaan adalah kecamatan Berbah dan Tempel. Sebaliknya, kecamatan yang memiliki sifat menonjol perkotaan adalah semua kecamatan di Kodya Yogyakarta. (kecamatan Mantriheron, Kraton, Mergangsan, dsb).
2. Kecamatan-kecamatan yang masih cukup terbelakang pembangunannya adalah kecamatan Panggang, Paliyan, Tepus, Semanu, Patuk, Ngawen, yang kesemuanya merupakan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul.
3. Kecamatan-kecamatan yang bersifat tinggi adalah kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, yang kesemuanya termasuk kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.
4. Kecamatan-kecamatan yang relatif maju adalah kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Sebaliknya, kecamatan-kecamatan yang relatif belum maju adalah kecamatan Sewon (Kabupaten Bantul).

5. Kecamatan-kecamatan yang masih relatif rendah Pos Kepolisian adalah kecamatan Pengasih (Kulon Progo), Sewon (Bantul), Moyudan (Sleman), Gondomanan (Kodya Yogyakarta).
6. Kecamatan-kecamatan yang masih relatif sedikit sekolah menengahnya adalah kecamatan Kokap (Kulon Progo), Imogiri, Sewon, Kasihan, Pajangan (Bantul), Tepus Semanu (Gunung Kidul), Danurejan (Kodya Yogyakarta).
7. Kecamatan-kecamatan yang relatif kurang tenaga paramedis adalah kecamatan Pundong (Bantul), Kraton, Kotagede, Danurejan, Ngampilan, dan Gedongtengen (Kodya Yogyakarta).
8. Kecamatan-kecamatan yang relatif kurang sehat lingkungannya adalah kecamatan Kretek, dan Sedayu (Bantul), Paliyan, Rongkop, Wonosari (Gunung Kidul), Danurejan dan Gedongtengah (Kodya Yogyakarta).
9. Kecamatan-kecamatan yang relatif kegiatan industri pengolahannya menonjol adalah kecamatan Kalibarang (Kulon Progo), Imogiri, Dlingo, Sewon, Pajangan (Bantul), Paliyan (Gunung Kidul), Moyudan, Seyegan (Sleman).
10. Kecamatan-kecamatan yang bersifat pantai adalah kecamatan Galur, Kalibarang (Kulon Progo), Srandakan, Sanden (Bantul), Panggang, Tepus, Rongkop (Gunung Kidul).
11. Kecamatan-kecamatan yang menonjol kegiatan warung atau perkebunan rakyat adalah kecamatan Samigaluh (Kulon Progo), Sanden, Sewon (Bantul), Patuk (Gunung Kidul), Kalasan, Ngemplak, Cangkringan (Sleman), Gedong Tengen (Kodya Yogyakarta).
12. Kecamatan-kecamatan yang memiliki perkembangan industri relatif banyak adalah ke-

camatan Bantul, Sewon (Bantul), Patuk (Gunung Kidul), Gedongtengen (Kodya Yogyakarta).

13. Kecamatan-kecamatan yang memiliki kegiatan industri kecil relatif menonjol adalah kecamatan Pleret, Sewon (Bantul), Paliyan (Gunung Kidul), Ngampilan (Kodya Yogyakarta).

Hasil klasifikasi di atas hanya berdasarkan data Potensi Desa 1996 dan Susenas 1997, tetapi belum termasuk data aspek-aspek pertanian secara lengkap. Apabila data tersebut diikutsertakan mungkin hasilnya dapat berbeda, sayangnya data aspek-aspek pertanian itu tidak ada yang tercantum dalam data Potensi Desa 1996 dan Susenas 1997 tersebut.

IV. PROGRAM PEMBANGUNAN

Usulan program pembangunan digali dari hasil klasifikasi yang diperoleh sesuai dengan potensi yang dimiliki atau masalah yang dihadapi. Tentu program yang diusulkan disini masih bersifat indikatif, yang dapat kiranya digunakan sebagai titik awal dalam memilih kegiatan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan masalah riil yang dihadapi suatu kecamatan. Usulan sementara kegiatan yang dimaksud disajikan pada tabel-tabel berikut, masih perlu melakukan pengecekan atas dasar fakta dan aspirasi masyarakat setempat.

Dengan memilih kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan di lokasi yang tepat, diharapkan hasil pembangunan akan lebih cepat terlihat yang sekaligus memperkecil kesenjangan secara spasial antar wilayah kecamatan dan pembangunan yang sesuai dengan potensi daerah serta aspirasi masyarakat.

Tabel 2.
Daftar Tabel Program Pembangunan Indikatif

No.	Aspek	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)
1	Memacu Kemajuan Pembangunan (Faktor 2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaikan perumahan ▪ Budidaya sawah tadah hujan ▪ Bantuan IDT ▪ Sertifikat tanah ▪ Penyusunan Sistem Informasi Pertanian 	Panggang, Paliyan, Tepus, Semanu, Patuk, Ngawen (Gunung Kidul)

2	Pembangunan Dataran Tinggi (Faktor 3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan Perkebunan Rakyat ▪ Penyuluhan ▪ Bantuan bibit unggul ▪ Pemasaran ▪ Sertifikat tanah ▪ Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan 	Kokap, Girimulyo, Samigaluh (Kulon Progo)
3	Prasarana Keamanan (Faktor 5)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan pos polisi dan keamanan lainnya 	Pengasih (Kulon Progo), Sewon (Bantul), Moyudan (Sleman), Gondomanan (Kodya).
4	Prasarana Sekolah Menengah (Faktor 6)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun sekolah SMP atau SMU 	Kokap (Kulon Progo), Imogiri, Sewon, Kasihan, Pajangan (Bantul), Tepus, Semanu (Gunung Kidul), Danurejan (Kodya).
5	Tenaga Paramedis (Faktor 7)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan tenaga paramedis 	Pundong (Bantul), Kraton, Kotagede Danurejan, Gedongtengen (Kodya).
6	Kesehatan Lingkungan (Faktor 8)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyemprotan nyamuk demam berdarah ▪ Peningkatan kebersihan air minum ▪ Sertifikasi tanah 	Kretek, Sedayu (Bantul), Paliyan, Rongkop, Wonosari (Gunung Kidul), Danurejan, Gedongtengen (Kodya).
7	Industri Pengolahan (Faktor 9)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan industri pengolahan ▪ Penyuluhan pencemaran lingkungan ▪ Sertifikasi tanah 	Kalibawang(Kulon Progo), Imogiri, Dlingo, Sewon, Pajangan (Bantul), Paliyan (Gunung Kidul), Moyudan, Seyegan (Sleman).
8	Kecamatan Pantai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan nelayan ▪ Bantuan perumahan bagi nelayan ▪ Sertifikasi tanah 	Galur, Kalibarang (Kulon Progo), Srandakan, Sanden (Bantul), Panggang, Tepus, Rongkop (Gunung Kidul).
9	Ekonomi Informal (Faktor 11)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan modal usaha pengusaha warung ▪ Pembinaan koperasi ▪ Srtifikasi tanah (Argumen modal usaha) 	Samigaluh (Kulon Progo), Sanden, Sewon (Bantul), Patuk (Gunung Kidul), Kalasan, Ngemplak, Cangkringan (Sleman), Gedongtengen (Kodya).
10	Industri kecil (Faktor 12 & 13)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan industri kecil : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyuluhan ✓ Pemasaran ✓ Bantuan modal usaha ▪ Sertifikasi tanah (bahan agunan untuk modal usaha) 	Galur, Kalibarang (Kulon Progo), Srandakan, Sanden (Bantul), Panggang, Tepus, Rongkop (Gunung Kidul).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kecamatan merupakan unit organisasi pemerintahan terkecil kedua setelah desa di Indonesia. Di kecamatan tempat kegiatan pembangunan bermuara sebelum dilaksanakan di desa. Oleh karena itu, sangatlah perlu mengenal karakteristik kecamatan secara mendalam agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan potensi desa. Sehingga tidak menimbulkan keresahan serta pemborosan sumber daya pembangunan.

Dari 54 variabel awal yang mencerminkan karakteristik desa, dengan menggunakan faktor analisis, dapat disederhanakan menjadi 13 variabel baru (faktor). Berdasarkan ke-13 faktor itu, seluruh kecamatan di Propinsi DIY dapat diklasifikasikan sehingga lebih mudah mendalami potensi dan permasalahan kecamatan yang dihadapi.

Atas dasar dan potensi yang dihadapi, kemudian bisa "diraba" jenis-jenis kegiatan yang perlu dilakukan agar kesenjangan spasial dapat diperkecil. Dengan cara ini, kegiatan yang diajukan akan bersifat spesifik-obyektif. Pelaksanaan kegiatan yang diusulkan, diharapkan dapat memperkecil kesenjangan spasial antarkecamatan dan antarkabupaten atau kotamadya.

Penyusunan sistem informasi pertanahan dalam wujud peta, sangat diperlukan sebagai titik tolak perencanaan pembangunan yang terkait dengan tanah. Sehingga neraca pertanahan (*Land Accounting*) dapat disusun secara terpadu di seluruh wilayah pedesaan, perlu dilaksanakan untuk mengetahui modal dasar yang dimiliki masyarakat di seluruh kecamatan sebagai titik tolak pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perkembangan waktu. Untuk itu registrasi pertanahan secara nasional perlu dilakukan untuk dapat melengkapi data Podes dan Susenas, dimana data tersebut sangat penting sebagai titik tolak pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UUPA.

DAFTAR PUSTAKA

- , Data Pokok Pembangunan Propinsi DIY.
- , Data Potensi Desa Tahun 1996 dan Susenas Tahun 1997, BPS –DIY.
- Kleinbaum, D.G. and S.S. Kupper. 1987. *Applied Regression Analysis and Other Multi-variable Methods*. Massachusetts : Duxbury Press.
- Paryono, Petrus. 1994. *Mengolah Data Statistik dengan SPSS/PC+*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Rummel, R.J. 1970. *Applied Factor Analysis*. Evanston : Northern University Press.
- Sandy, I Made. 1982. *Pembangunan di Desa*. Publikasi No. 187.
- , 1995. *Tanah Muka Bumi*. Jakarta : Indograph Bakti.
- Silalahi, SB. 1998. *Informasi Petanahan dan Pembangunan Berkelanjutan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Silalahi, SB. 1982. *Penggunaan Tanah dan Fakta yang mempengaruhinya di Daerah Pedesaan di Sumatera Utara*. Publikasi No. 215 Dit. Tata Guna Tanah Dit.Jen. Agraria Departemen Dalam Negeri.

